



- Bintarto, R. 1976. *Interpretasi Foto Udara Dan Studi Kekotaan*. Yogyakarta : Fakultas Geografi-UGM.
- _____. 1977. *Studi Tata Ruang Kota Dalam Hubungannya Dengan Interpretasi Foto Udara* PUSPICS. Fakultas Geografi-UGM. Yogyakarta, 67 hal.
- _____. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta : U.P. Spring.
- Bambang Suryono, FX. 1984. *Klasifikasi Kualitas Permukiman Kota Berdasarkan Foto Udara di Kotamadya Bogor*. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Geografi-UGM.
- Birowo Budi Santoso. 1987. *Penggunaan Foto Udara untuk Pemetaan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Di Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Geografi-UGM.
- Dirjen Bina Marga Sub Direktorat Jalan Kota. 1983. *Penelitian Terbatas Transportasi Kota Kota Surakarta*. Rencana Bagian Wilayah Kota Surakarta Tahun 1986/1987 - 2003/2004.
- Dirjen Pajak Kantor Wilayah V Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta. 1986. *Klasifikasi Bumi Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*. Semarang : Dirjen Pajak Jateng & D.I.Y. Foto Copy.
- Dirjen Pajak Kantor Wilayah V Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta. 1986. *Klasifikasi Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta*. Semarang : Dirjen Pajak Jateng & D.I. Yogyakarta. Foto Copy.
- Estes, John E. 1979. *Remote Sensors, What They See And How It Is Recorded In : Remote Sensing For Planners*. Ed. Kristina Ford. New Jersey : Center For Urban Policy Research.

- Howard, A William et al. 1973. *An Evaluation Of The Usefulness Of Remote Sensing Techniques In Making Environmental Quality Determination*. Denver : Departement Of Geography University Of Denver.
- Hari Susanto. 1985. *Kemudahan dan Keterperincian Data Penggunaan Lahan Kota Dari Foto Udara. Studi Kasus Di Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Geografi - UGM.
- Kardono Darmoyuwono. 1979. *Penginderaan Jauh Di Indonesia*. Yogyakarta : BAKOSURTANAL-PUSPICS Fakultas Geografi-Universitas Gadjah Mada.
- Lerche, Dietrich . 1977. *Efisiensi Perpajakan Indonesia Di Indonesia*. Prisma 10 Oktober Tahun IX. LP₃ES. Jakarta.
- Lillesand, Thomas M and Kiefer, Ralph W. 1979. *Remote Sensing And Image Interpretation*. New York : John Willey and Sun Inc.
- Rachmat Soemitro. 1986. *Pajak Bumi Dan Bangunan*. Bandung : PT. Eresco.
- Santoso Brotodiharjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco.
- Salamun, AT. 1987. *Separuh Dari Wajib Pajak Belum Penuhi Kewajibannya*. Kompas 28 Februari 1987.
- Short, Nicholas M. 1982. *The Landsat Tutorial Work Book*. Washington, DC: NASA Scientific and Technical, Information Branch.
- Sutanto, R. 1977. *Interpretasi Tataguna Tanah Kota*. Kuliah pada Pusat Pendidikan Interpretasi Foto Udara Pasca Sarjana Angkatan II. Fakultas Geografi-UGM. Yogyakarta. Foto copy.
- _____. 1978. *Penggunaan Foto Udara Untuk Studi Tataguna Lahan Kota Kotamadya Surakarta*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian - UGM. No. 14. 53 hal.
- _____. 1987. *Metode Penelitian Penginderaan Jauh Untuk Geografi*. Yogyakarta : Disiapkan dalam rangka



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Pemanfaatan foto udara untuk penaksiran nilai pajak ELMI dan bangunan (PBB) di kecamatan Serengan-kotamadya Surakarta

Slamet Trisemediono, Prof. Dr. Sutanto

Universitas Gadjah Mada, 1990 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Geografi-Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tanggal 28 Desember 1987.

Foto copy.

Sudharma Pudji. 1987. *Penggunaan Foto Udara Jenis Pankromatik Hitam-Putih (1 : 5.500 dan 1 : 20.000) serta Infra Merah Berwarna (1 : 30.000) Untuk Klasifikasi Kualitas Permukiman Kota Di Kotamadya Surakarta.* Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Geografi-UGM.

Tajuk Rencana. 1987. *Kesadaran Membayar Pajak Makin Meningkatkan dan Meluas.* Kompas 13 Januari 1987.

----- . 1986. *Wajib LP₂P.* Bina Pajak. Kompas 19 September 1986.

----- . 1986. *Masalah Pemeriksaan Pajak.* Kompas 19 September 1986.

----- . 1987. *Target PBB Turun Karena Gedung Pemerintah Bebas.* Kompas 11 Maret 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang *Pajak Bumi dan Bangunan.* Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia.